

TAJUK RENCANA

Calhaj Ilegal, 'Warning' Kita Semua

**PROBLEMA** haji belum juga berhenti. Problem paling aktual saat ini adalah ditahannya 177 calon haji (calhaj) Indonesia di Filipina karena menggunakan paspor palsu. Meski pihak Indonesia sudah berusaha untuk bisa memulangkan (karena mereka korban kejahatan), namun sampai Kamis (25/8) kemarin mereka masih ditahan di Bandara Manila.

Sebenarnya, kaum Muslim Indonesia yang berangkat haji melalui negara lain sudah sering terjadi. Bukan hanya Filipina, tetapi juga negara tetangga lainnya. Hal ini juga diakui Menlu Retno LP Marsudi yang menyatakan penggunaan paspor Filipina oleh WNI dengan maksud memanfaatkan kuota haji Filipina karena keterbatasan kuota di Indonesia merupakan peristiwa yang cukup sering terjadi (KR, Rabu 24/8). Hanya saja, selama ini lancar-lancar saja dan aman-aman saja. Tidak seperti yang menimpa ke 177 calhaj dari berbagai daerah ini.

Meski demikian, kenyataannya ini harus menjadi pemikiran kita semua. Realitas bahwa jika mendaftar haji secara resmi harus menunggu lama untuk berangkat, harus dicari-cari solusi. Dalam hal ini, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah kongkret sehingga lamanya masa tunggu (*waiting list*) bisa dikurangi.

Cara yang bisa ditempuh antara lain dengan melakukan lobi kepada pemerintah Arab Saudi agar kebijakan pemotongan kuota haji 20% segera dihentikan, sehingga tahun cepean bisa memberangkatkan jemaah sesuai kuota kota yang ditentukan. Bukankah kebijakan pemotongan kuota 20% tiga tahun lalu karena sedang dilakukannya renovasi Masjidil Haram. Sedang saat ini proses renovasi bisa dibilang sudah selesai dan arena thawaf (mathaf) sudah cukup luas dan bisa menampung jauh lebih banyak jemaah yang melakukan thawaf pada saat yang sama, dibanding sebelum renovasi.

Selain itu, pemerintah RI juga bisa melobi pemerintah Arab Saudi su-

paya bisa memanfaatkan sisa kuota negara-negara lain. Sebab ada sejumlah negara yang karena berbagai hal kaum muslimnya yang berangkat haji jumlahnya di bawah kuota, termasuk Filipina. Padahal jumlah peminat haji di Indonesia sudah jauh melampaui kuota.

Kedua upaya ini kiranya perlu dilakukan pemerintah Indonesia sesegera mungkin, misalnya dilakukan Amirul Haji saat musim haji nanti. Sebab, meski kalau dikabulkan (penambahan kuota) baru bisa dilaksanakan pada musim tahun depan, namun penyiapannya membutuhkan waktu lama. Persiapan tersebut antara lain menyangkut penyediaan sarana transportasi Indonesia-Saudi PP dan angkutan selama di Tanah Suci), akomodasi (penyewaan hotel sebagai pemondokan) dan penyediaan catering untuk jemaah selama di Tanah Suci yang jumlahnya akan lebih banyak dibanding tahun sebelumnya.

Sedang kepada umat Islam yang ingin melaksanakan rukun Islam ini, hendaknya menempuh cara-cara yang legal. Artinya, mendaftar secara resmi melalui lembaga yang resmi. Kalau berangkat haji secara reguler melalui Kemenag. Sedang kalau haji khusus (plus) menggunakan biro perjalanan yang resmi. Termasuk jika akan berangkat umrah di luar musim haji.

Sebab, di saat peminat ke Tanah Suci tinggi, ada saja biro perjalanan tidak resmi atau ada oknum yang ingin mengeruk keuntungan. Untuk mengecek apakah sebuah biro perjalanan resmi atau tidak sebenarnya mudah. Sebab daftar yang resmi bisa diakses di situs Kemenag RI. Kalau pun biro perjalanan di daerah yang hanya agen, maka perlu dipastikan bahwa pusatnya adalah biro yang resmi.

Bagaimanapun, haji dan umrah merupakan perjalanan suci. Karena itu sudah semestinya kalau ditempuh dengan cara yang benar, sehingga tercipta kenyamanan dan ada kepastian keberangkatan. □ - k

Rokok, Sebuah Wacana Dilematis

**J**UMLAH perokok di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring meningkatnya produksi rokok. Data menunjukkan tahun 1995, jumlah perokok di Indonesia mencapai 27% dari jumlah penduduk di Indonesia dan tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 36%. Statistik konsumsi rokok dunia pada 2014 kembali menempatkan posisi Indonesia sebagai salah satu negara konsumen rokok terbesar di dunia.

Di tahun 2013, konsumsi rokok dunia mencapai 5,8 triliun batang, 240 miliar batang (4,14%) di antaranya dikonsumsi oleh perokok Indonesia. Prevalensi merokok penduduk Indonesia tergolong tinggi di berbagai lapisan masyarakat, terutama laki-laki mulai dari usia anak-anak hingga dewasa. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2014, tren usia merokok meningkat pada usia remaja yaitu kelompok usia 10-14 tahun dan 15-19 tahun. Sehingga kelompok ini perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pola konsumsi rokok di Indonesia.

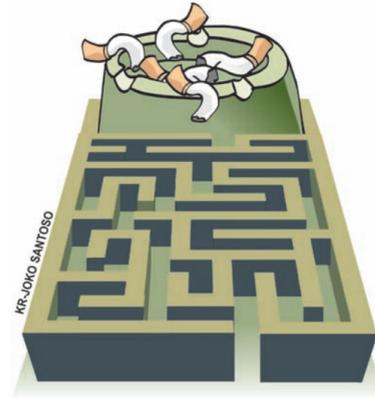
Akibat Rokok

Biaya kesehatan, ekonomi dan sosial yang ditimbulkan akibat konsumsi tembakau terus meningkat. Menurut data WHO, Indonesia merupakan negara ketiga konsumsi rokok terbesar di dunia setelah China dan India yang diikuti 50% kematian akibat rokok di negara berkembang. Beberapa studi menunjukkan dampak konsumsi rokok seperti kematian bagi bayi dan keguguran, asma, infeksi saluran pernapasan dan depresi. Ada indikasi hubungan kecenderungan merokok dengan depresi sehingga memiliki probabilitas yang mengarah pada konsumsi nikotin yang lebih tinggi seperti ganja dan sejenisnya.

Berdasarkan data Riskesdas 2013, sekitar 85% rumah tangga di Indonesia terpapar asap rokok. Yang berarti estimasi delapan perokok meninggal dunia karena perokok aktif dan satu perokok pasif meninggal akibat dampak dari paparan perokok lainnya. Selain masalah kese-

Tony Wijaya

hatan, rokok juga meningkatkan belanja untuk pengeluaran rumah tangga dan hal ini menjadi beban bagi rakyat golongan menengah ke bawah. Tembakau merupakan urutan ke dua setelah pengeluaran untuk konsumsi padipadian.



Rokok merupakan masalah lama yang terus dihadapi pemerintah namun sulit untuk diselesaikan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah seiring tindakan pencegahan merokok seperti pembatasan ruang merokok, peringatan bahaya rokok di kemasan rokok, kampanye anti-merokok, pembatasan iklan rokok dan sebagainya. Upaya-upaya tersebut dinilai masih belum efektif karena belum mampu menekan tingkat konsumsi rokok dari tahun ke tahun.

Beberapa negara dengan tegas memberlakukan aturan larangan merokok di tempat publik seperti Skotlandia, Irlandia, dan Inggris yang berhasil menurunkan penjualan sebesar 11,6% perbulan. Namun aturan ini perlu diberlakukan secara tegas yang disertai dengan kon-

sekuensi-konsekuensi apabila terjadi pelanggaran. Upaya ini juga dilakukan di Indonesia namun sifatnya masih lokal, belum nasional dengan peraturan-peraturan daerah mengenai kawasan bebas rokok. Namun sekali lagi, peraturan ini belum dijalankan secara tegas sehingga cenderung diabaikan oleh perokok aktif.

Industri Rokok

Pemerintah mencoba wacana baru dengan menaikkan harga rokok hingga Rp 50.000. Wacana ditanggapi secara positif oleh masyarakat yang sadar akan kesehatan namun ditanggapi negatif oleh industri rokok. Masyarakat yang sadar akan kesehatan menjadikan wacana ini sebagai upaya mengurangi tingkat konsumsi rokok. Secara positif dampak buruk dari asap rokok dapat berkurang seiring mahalnya biaya yang dikeluarkan untuk dibakar lewat sebatang rokok.

Industri rokok menganggap wacana kenaikan rokok akan mematikan usaha mereka. Ketika harga rokok naik, biaya produksi juga akan meningkat. Sehingga beberapa biaya produksi akan dipangkas. Salah satu dampak dari tingginya biaya produksi adalah pemangkas tenaga kerja. Industri rokok juga mengklaim bahwa industri ini telah memberikan sumbangsih sekitar Rp 157 triliun bagi pendapatan negara.

Hal ini bukanlah menjadi suatu kendala, apabila pemerintah mampu menjabarkan secara efektif produksi tembakau di Indonesia. Salah satunya dengan mengaktifkan kegiatan ekspor tembakau. Sehingga produksi tembakau tetap berjalan namun bukan dikonsumsi secara internal. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan mampu menyelesaikan suatu masalah tanpa menimbulkan masalah yang lain. Selain wacana harga rokok, batasan area bebas rokok perlu didukung secara nasional dengan perlakuan yang tegas. Kesadaran akan dampak buruk rokok perlu menjadi wacana bagi pendidikan di Indonesia. □ - k

\*) Dr Tony Wijaya SE MM, Dosen FE Universitas Negeri Yogyakarta.

Peran Organisasi Perempuan dalam Memerangi Kekerasan

**T**ERCIPTANYA kehidupan yang penuh keadilan sosial adalah cita-cita mendasar semua masyarakat. Salah satu wujud dari keadilan sosial adalah adanya kesetaraan jender dalam relasi sosial masyarakat. Dalam rangka mencapai cita-cita tersebut, organisasi perempuan, yang merupakan bagian dari masyarakat sipil yang mampu mengorganisir diri sendiri (Cohen dan Arato, 1992) setidaknya mempunyai tiga peran dan fungsi penting (Gandhi Lapien 2012, Otho Hadi, 2010) dalam penegakan keadilan dan kesetaraan jender. Yaitu sebagai pengawas dan pemantau, sebagai pejuang perbaikan (advokasi), dan sebagai pemberi informasi kepada sesama warga masyarakat.

Pengawas dan Pemantau

Peran sebagai pengawas dan pemantau dilakukan organisasi perempuan dengan melaporkan atau mengadukan kepada pihak berwenang pada saat menyaksikan atau mengalami kekerasan. Mengadukan dan melaporkan kekerasan yang terjadi membutuhkan keberanian yang besar dari pihak pelapor atau korban. Karena sangat mungkin terjadi bahwa pelaku yang dilaporkan adalah orang yang dikenal, atau bahkan dalam kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan seksual pelaku adalah kerabat dekat, belum lagi kebenaran informasi yang disampaikan pun harus terjamin. Bagi korban, mengadukan kekerasan juga berarti merelakan diri untuk dibuka aibnya, kadangkala bahkan bisa berbalik dituduh sebagai pencemaran nama baik, atau malah lebih direndahkan lagi sebagai penyebab perilaku. Untuk mendukung peran ini beberapa organisasi perempuan membuka layanan-layanan pengaduan yang juga melindungi korban atau pelaku.

Memperjuangkan perbaikan agar tercipta situasi yang lebih baik dapat dilakukan dengan memberikan layanan pendampingan dan advokasi bagi korban. Juga memulihkan trauma dan harga diri korban, memberikan semua dukungan (sosial, ekonomi, hukum) pada korban. Selain menghukum pelaku, memperbaiki sistem perlindungan, mengubah lingkungan sosial melalui pemberdayaan masyarakat. Layanan ini dilakukan oleh lembaga-lembaga perempuan

Abidah Muflihati

dengan mendirikan *crisis center* dan saling berjejaring agar layanan yang diberikan saling melengkapi.

Selain kekerasan seksual, ada juga jenis kekerasan terhadap perempuan yang tidak banyak diperhatikan orang. Bahkan mungkin tidak dirasakan oleh kebanyakan perempuan, termasuk kadangkala oleh aktivis perempuan, yaitu kekerasan beban ganda (*double burden*). Laporan pengaduan atas kekerasan beban ganda juga jarang ditemukan, kalau pun ada itu menjadi bagian kecil dalam laporan kronologi KDRT.

Beban Ganda

Beban ganda merupakan bentuk kekerasan di mana perempuan menanggung beban pekerjaan di ruang publik sekaligus juga semua beban pekerjaan domestik. Bagi masyarakat hal ini merupakan hal yang wajar dan suatu keharusan. Bahkan sebagian aktivis perempuan sukses di luar rumah, harus juga sukses urusan rumah tangga. Tidak sedikit aktivis perempuan yang membanggakan diri bahwa sebelum berangkat bekerja ke kantor, sudah memasak untuk suami dan anak, membersihkan rumah. Sepulang kerja menyempatkan diri berbelanja, menjemput anak, dan memasak untuk makan malam. Mereka di juluki sebagai *super woman*, dipuji dengan mempunyai kemampuan *multi tasking*. Gambaran profil perempuan semacam ini bahkan muncul dalam iklan di layar TV sebagai Ibu yang ideal.

Pertanyaannya: apa yang dilakukan oleh suaminya?, Apakah dia ikut membantu mengerjakan pekerjaan domestik di rumah?, Apakah dia ikut terlibat dalam urusan-urusan kecil pengasuhan anak? Jika jawabannya adalah urusan pekerjaan rumah tangga merupakan tugas istri, dan

adalah tabu jika suami membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, maka terjadilah kekerasan beban ganda tersebut. Jika keluarga tersebut, kemudian mencari perempuan lain untuk mengerjakan pekerjaan domestik, maka telah terjadi pengalihan beban ganda dari si istri kepada perempuan lain. Dan perempuan itu mungkin juga ibu di sebuah keluarga.

Karenanya perlu edukasi masyarakat khususnya laki-laki, bahwa pekerjaan domestik adalah pekerjaan yang dapat dilakukan dengan berbagi antara laki-laki dan perempuan. Nasyiatul Aisyiyah yang berbasis pada volunteerisme telah lama berada di jalur peran edukasi, kini saatnya beranjak pada peran pejuang perbaikan (advokasi) dan pengawas. Rintisan pelatihan paralegal yang telah dilakukan perlu ditindaklanjuti ke aksi yang lebih konkret. Momen muhtamar XIII adalah forum tepat untuk meneguhkan hal tersebut. □ - k

\*)Abidah Muflihati, Ketua III Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah periode 2012-2016, Pengajar di Prodi Ilmu Kesehatan Sosial UIN Sunan Kalijaga Naskah kerja sama KR - Nasyiatul Aisyiyah.

Pojok KR  
Bupati ngotot bangun mal  
-Baiknya dirembuk bersama.  
\*\*\*  
Trotoar ramah disabilitas diperbanyak.  
-Mereka juga punya hak sama.  
\*\*\*  
Bank harus permudah pencairan KIP.  
-Demi anak-anak didik kita.  
Beraba



Pikiran Pembaca

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email [pikiranpembaca@gmail.com](mailto:pikiranpembaca@gmail.com). Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

Membuat E-KTP, Masih Perlu Surat Pengantar?

**PADA** 12 Mei 2016, Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 471/1768/SJ Tentang Percepatan Penerbitan KTP-el dan Akta Kelahiran, di mana poin 1 menyatakan dalam pelayanan perekaman, penerbitan dan pengantian e-KTP yang rusak dan tidak mengubah elemen data penduduknya, perlu penyederhanaan prosedur. Cukup dengan menunjukkan fotokopi Kartu Keluarga tanpa surat pengantar dari RT, RW dan Kelurahan/Kecamatan.

Namun dalam kenyataannya di Kecamatan Depok Sleman, kecamatan bersikeras biarpun telah melakukan perekaman namun untuk mencetak e-KTP harus dengan surat pengantar dari RT, RW, Dukuh dan

Kelurahan/Kecamatan. Seharusnya Pemerintah (Kemendagri) terlebih dahulu melakukan sosialisasi Surat Edaran tersebut kepada jajaran di bawahnya. Atau mungkin dalam hal ini Kecamatan Depok Sleman merasa lebih tinggi wewenangnya sehingga dapat mengabaikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri?

Selain itu kepada Menteri Dalam Negeri dan jajarannya harap memastikan kebijakan yang dikeluarkan diikuti jajaran di bawahnya. Jangan hanya menggunakan slogan 'Revolusi Mental' jika masih memegang prinsip kalau bisa susah buat apa dibuat mudah. □ - k

Dhio Shkarov  
HP: 081381480763

Besok Wisuda UNY, Hindari Kawasan GOR

**PADA** hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) akan mengadakan wisuda di GOR UNY, Jl Colombo 1 Yogyakarta, mulai pukul 06.00-14.00 WIB. Terkait dengan banyaknya kendaraan keluarga wisudawan, kemungkinan kawasan GOR UNY akan terj-

di kemacetan. Untuk itu diharapkan agar warga tidak melewati Jalan Colombo pada jam tersebut. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih, mohon maaf atas kekurangnyamanannya ini. □ - k

Herman MPd  
Kepala Humas UNY.

Perpustakaan Daerah Sleman Adakan Berbagai Lomba

**MEMERIAHKAN** HUT ke-71 Kemerdekaan RI, Hari Pramuka dan menumbuhkembangkan minat dan budaya baca di kalangan pelajar, Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman menyelenggarakan beberapa lomba yaitu Lomba Menulis SMP/MTs se-Kabupaten Sleman, Tema 'Arti Kemerdekaan bagi Remaja' dan 'Gerakan Pramuka Menumbuhkan Kemandirian Anak'. Pendaftaran paling lambat 26 Agustus 2016 dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia Wahyuning-sih SIP, HP: 081227004458.

Lomba Menulis tingkat SMP/MTs, 29 Agustus 2016 di Gedung Serbaguna Kabupaten Sleman, Lomba Minat Baca tingkat SD dan SMP, peserta mengumpulkan sinopsis cerita rakyat untuk SD, cerita pahlawan untuk SMP, biodata dan video penampilan peserta durasi 3 menit. Pendaftaran paling

lambat 27 Agustus 2016, informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia Ratih Wulandari, HP: 081838120066.

Pengumuman 40 Besar (20 Putra dan 20 Putri) 29 Agustus 2016, semi final 40 besar 31 Agustus 2016, final dan pengumuman pemenang 7 September 2016.

Lomba Permainan Tradisional diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus 2016 bertempat di Gedung Serbaguna Kabupaten Sleman, informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia Wahyuning-sih SIP, HP: 081227004458.

Seluruh hadiah lomba akan disampaikan pada acara Gemilang Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman 2016 bertepatan pada Hari Kujung Perpustakaan 14 September 2016. □ - k

Ratih Wulandari  
Panitia Lomba Menulis dan LMB 2016.

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS: ISSN: 0852-6496.  
Penerbit: PT-PB Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.  
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).  
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008) Penasihat: Drs HM Idham Samawi.  
Komisaris Utama: Drs HM Romli. Direktur Utama: dr Gun Nugroho Samawi.  
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH.  
Direktur Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSoS.  
Pemimpin Umum: dr Gun Nugroho Samawi. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Drs Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA, Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Musahada. Manajer Litbang Diklat Redaksi: Wismoko Poernomo, Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Drs Sihono HT, H Soeparno S Adhy, Drs Widyo Suprayogi, Dra Esti Susilarti MPd, Yun Haryono Hadi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Hj Prabadari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Herry Sugito, Drs Jayadi K Kastari, Sutopo Sgh, M Arief Budiarto, Subchan Mustafa, Sulistyoto Sutopo, Drs Hasto Sutadi, Eko Boediartoro, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H Chaidir, M Sobirin, Linggar Sumukti, Agung Purwandono, Riyana Ekawati SIKom, Wahyu Priyanti SH, Ardi Wahdan SPd. Fotografer: Efty Widjono Patro, Franz Boedi Sukarhanto, Surya Adi Lesmana, Bambang Nurahya. Grafis: Joko Santoso SSh, Bagus Wijanarko. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyanti.  
Pemimpin Periklanan: Fajar Kusumawardhani SE. Kepala TU Lngganan: Purwanto Hening Widodo BSE, Telp (0274)- 565685 (Hunting) Manajer Iklan : Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: [iklan@kr.co.id](mailto:iklan@kr.co.id), [iklankrk23@yahoo.com](mailto:iklankrk23@yahoo.com), [iklankrk13@gmail.com](mailto:iklankrk13@gmail.com).  
Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'. Rp 65.000,00. Iklan Umum/Display. Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga... Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Clik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00 /baris. Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 km x 45 mm. Rp 210.000,00. (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 km x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%  
Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40 - 42 Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)  
Alamat Persebaran: Jalan Raya Yogyakarta - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573. Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan  
Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan [www.kryogja.com](http://www.kryogja.com). Alamat e-mail: [naskahkr@gmail.com](mailto:naskahkr@gmail.com). Radio : KR Radio 107.2 FM.  
Bank: Bank BNI - Rek: 003.044.0854 Cabang Yogyakarta.  
Perwakilan dan Biro:  
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.  
Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaidi Raqib, Syaifulhul Hadmar, Muchlis Ibrahim, Alfons Suhadi, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.  
Semarang: Jalan Lamperanti No.62, Semarang, Telp (024) 831739-844822. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP, Wakil Kepala Biro : Sukaryono BA.  
Surakarta: Jalan Bhayangkara No.13, Surakarta 57141. Telp/Fax (0271) 718015. Kepala Perwakilan: Dra Hermin Lestari, Kepala Biro: Qomarul Hadi.  
Banjumas: Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp (0281) 622244/Fax (0281) 621797. Kepala Perwakilan: Ach Pujjianto SPd, Kepala Biro: Edhi Romadhon.  
Blitar: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Kepala Biro : Sri Waristi .  
Magelang: Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552, 362502. Kepala Perwakilan: Suniarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.  
Purworejo: Jalan Veteran Blok A Kav. 6, Purworejo Plaza, Telp/Fax (0275) 321848. Kepala Perwakilan: Suprpto SPd, Kepala Biro : Gunarwan.  
Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suyatno, Kepala Biro: R Agusutata.  
Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562, 394707. Kepala Perwakilan: Subardi, Kepala Biro: Y Agus Waluyo .  
- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.